

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA (PRB) DI  
DAERAH RAWAN BENCANA KABUPATEN SLEMAN**

Oleh:  
**Herpita Wahyuni**  
**20160520008**

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah  
penulisan karya ilmiah

**Dosen Pembimbing**



**Sakir Ridho Wijaya, S. IP., M.IP.**  
**NIK: 19891106201604 163 156**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik**



**Dr. Tiin Purwaningsih, S.IP., M.Si.**  
**NIK: 19690822199603 163 038**

**Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.**  
**NIK: 19660828199403 163 025**

# **PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA (PRB) DI DAERAH RAWAN BENCANA KABUPATEN SLEMAN**

**Herpita Wahyuni, Sakir**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  
Email: [Herpitawahyuni@yahoo.com](mailto:Herpitawahyuni@yahoo.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengarusutamaan pengurangan resiko bencana gunung merapi di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana diperlukan di Kecamatan Cangkringan karena daerah yang paling terdampak terhadap ancaman letusan gunung merapi. Pengurangan resiko bencana dilakukan melalui pembangunan struktural maupun pembangunan non struktural. Pembangunan struktural melalui penataan ruang, pengaturan, pembangunan, dan Pembangunan infrastruktur. Sedangkan pembangunan non struktural dengan melalui pendidikan sekolah bencana, pelatihan, dan penyuluhan tentang bencana. Dengan pengurangan resiko bencana dapat meminimalkan kerugian dan kerusakan.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif desain studi kasus yang akan mengkaji dan menganalisa pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui pembangunan struktural dan pembangunan non struktural secara mendalam dan dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari data wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini tentang pengarusutamaan pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana Kabupaten Sleman dengan fokus penelitian di Kecamatan Cangkringan dari enam indikator terlaksana cukup baik. Pelakasanaan penataan ruang di Kecamatan Cangkringan dipahami oleh warga Cangkringan dan berupaya untuk melakukan penataan ruang yang sesuai seperti penanaman pohon untuk menjaga penghijauan. Pengaturan pembangunan di Kecamatan Cangkringan dipahami oleh warga Cangkringan dan masih ditemukan pembangunan liar dikarenakan faktor ekonomi yang belum memadai. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Cangkringan terlaksana dengan baik yakni

tersedianya jalan untuk mempermudah jalur evakuasi, barak pengungsian, terpasangnya tanda peringatan dini, dan tersedianya hunian tetap bagi warga yang terdampak. Sekolah siaga bencana di Kecamatan Cangkringan sudah merata dan sangat diperlukan bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan dalam mengurangi resiko bencana. Pelaksanaan pelatihan diberikan baik dari pemerintah maupun non pemerintah yakni setahun sekali yang berbentuk simulasi bencana. Kegiatan penyuluhan dalam upaya pengurangan resiko bencana dilaksanakan setiap setahun sekali dan memperoleh informasi yang dibutuhkan warga di kawasan rawan bencana gunung merapi.

**Kata Kunci:** Pengarusutamaan, Pengurangan resiko bencana (PRB) Cangkringan, Sleman

## Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah daerah di Indonesia yang memiliki ancaman terhadap bencana gunung merapi. Gunung dengan ketinggian 2.980 meter ini termasuk gunung yang paling aktif, pada tahun 2010 merupakan kejadian letusan gunung merapi terbesar dengan kerusakan skala tinggi dibandingkan lima erupsi sebelumnya yang terjadi pada tahun 1994, 1997, 1998, 2001, dan 2006. Erupsi gunung merapi tahun 2010 memakan korban sebanyak 354 jiwa meninggal dunia, 240 jiwa luka-luka, dan 47.486 orang yang ada di sekitar gunung merapi mengungsi (Febriyan, 2017). Erupsi menimbulkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 3,557 triliun. Kerugiannya dapat terperinci pada tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kerugian Akibat Erupsi**

No	Kerugian dan Kerusakan	Jumlah kerugian
1	Sektor ekonomi produktif	Rp. 1,692 triliun
2	Sektor infrastruktur	Rp. 707,427 miliar
3	Sektor perumahan	Rp. 626,651 miliar
4	Lintas sektor	Rp. 408,758 miliar
5	Sektor sosial	Rp. 122,472 miliar

Sumber: (Widodo, 2010 dalam Susilo dan Rudiarto, 2014).

Pasca letusan gunung merapi tahun 2010, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Kabupaten Sleman sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) III yaitu di Kecamatan Pakem, Turi, Tempel, Ngemplak dan Cangkringan. Daerah yang memiliki resiko bencana erupsi merapi paling tinggi terjadi di Kecamatan Cangkringan, dengan mencakup 9 dusun yaitu dusun Kaliadem, dusun Petung, dusun Jambu, dusun Kopeng, dusun Pelemsari, dusun Pangkurejo, dusun Srunen, dusun Kalitengah Lor dan dusun Kalitengah Kidul (Fatmawati dan Rahayu, 2016).

Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dalam pasal (6) huruf a yang berbunyi bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penanggulangan resiko bencana yang dapat dipadukan dengan program pembangunan yang berbasis mitigasi bencana. Untuk melihat keberhasilan dalam pengurangan resiko bencana melalui pembangunan maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengarusutamaan pengurangan resiko bencana (PRB) dalam pembangunan pada daerah rawan bencana di Kabupaten Sleman

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengarusutamaan pengurangan resiko bencana (PRB) dalam pembangunan pada daerah rawan bencana di Kabupaten Sleman.

## **2. Metodologi**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif desain studi kasus yaitu melakukan penyelidikan dan menganalisa studi kasus secara mendalam (Creswell, 2018). Lokasi penelitian fokus pada Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Nvivo dengan fitur *Create New Project*, *Fitur Import*, *Fitur node*, dan *Fitur Crosstab*.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

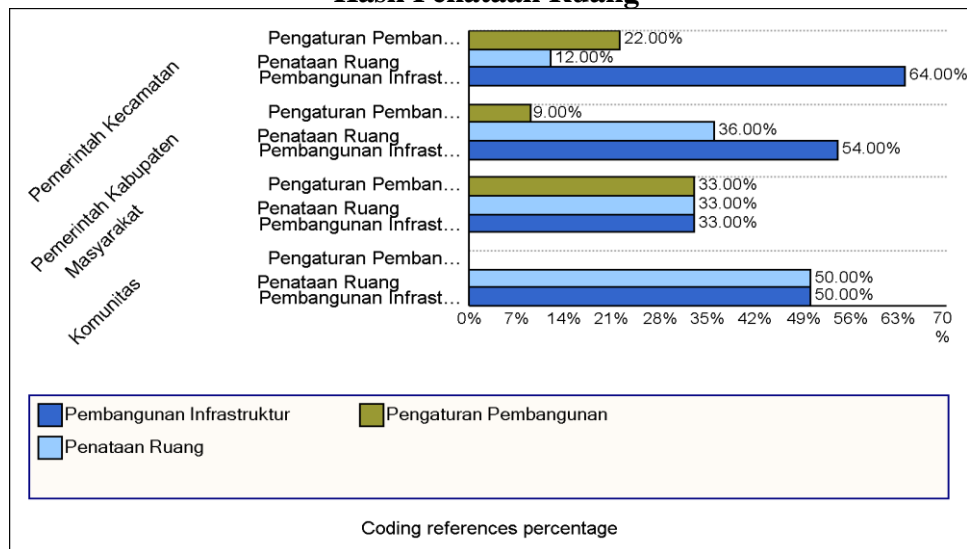
Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana (PRB) di daerah rawan bencana Kabupaten Sleman dengan lokasi penelitian di Kecamatan Cangkringan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengurangi resiko bencana. Upaya yang dilakukan pembangunan

yaitu pembangunan struktural adalah penataan ruang, pengaturan pembangunan dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan non struktural yaitu pelaksanaan sekolah siaga bencana, pelatihan, dan penyuluhan tentang kebencanaan (Isdarwati, 2019).

### 3.1 Penataan Ruang

Pengurangan resiko bencana adalah adalah kebijakan yang berakitan dengan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan tata guna lahan dalam mengurangi resiko bencana (Amni, 2017). Pengelolaan tata ruang adalah kebijakan yang diberikan pemerintah dalam menata ruang dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, pelaksanaan penataan ruang adalah upaya dalam memperindah ruang dan yang utama menghindari kerusakan pada ruang. Mengelolah ruang di kawasan rawan bencana III adalah upaya menata ruang dan mempersiapkan tempat yang sesuai dengan ruang tersebut dengan harapan tidak menimbulkan kerusakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan data yang telah diolah dengan teknik *Nvivo* menggunakan *fitur Crosstab Query* maka didapatkan data yang dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini:

**Gambar 3.1**  
**Hasil Penataan Ruang**



Sumber: (Data diolah dengan Nvivo 12 Plus, 2019).

#### 3.1.1 Penataan Ruang dari Prespektif Kecamatan

Pelaksanaan penataan ruang di Kecamatan Cangkringan sangat penting untuk dilakukan dalam upaya melindungi warga dan mengurangi kemungkinan buruk yang terjadi. Secara keseluruhan warga Cangkringan memahami tentang Tata Ruang (Kebijakan

Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012. Tentang rencana tata ruang wilayah Kab Sleman Tahun 2011-2031 dengan tujuan Kabupaten Selaman yang tanggap bencana. Masih ditemukan pembangunan liar dengan alasan perekonomian dan pihak kecamatan masih memaklumi pembangunan liar memberi himbauan untuk terus waspada.

### **3.1.2 Penataan Ruang dari Prespektif Kabupaten**

Penataan yang yang dilaksanakan yaitu dalam penentuan tempat sisitem peringatan dini yang terpasang yang dapat menjangkau seluruh kecamatan cangkringan, melaksanakan penataan pemasangan jalur evakuasi yang sesuai dengan tata letak yang dapat melaksanakan proses evakuasi dengan cepat dan telah terpasang secara merata. Tersedianya ruang evakuasi (Titik kumpul di setiap dusun, dan balai desa) Membuat hunian tetap dan hunian sementara di lokasi yang aman (tidak di KRB III).

### **3.1.3 Penataan Ruang dari Prespektif Masyarakat**

Masyarakat paham tentang aturan penataan ruang dengan harapan ruang di Kecamatan Cangkringan dapat tertata dan meminimlkan kerugian yang besar. Pelaksanaan penataan ruang belum berjalan dengan maksimal dengan alasan untuk berdagang dan sekaligus untuk tempat tinggal. Namun solidaritas warga cukup tinggi menata ruang dengan menanam pohon bersama-sama.

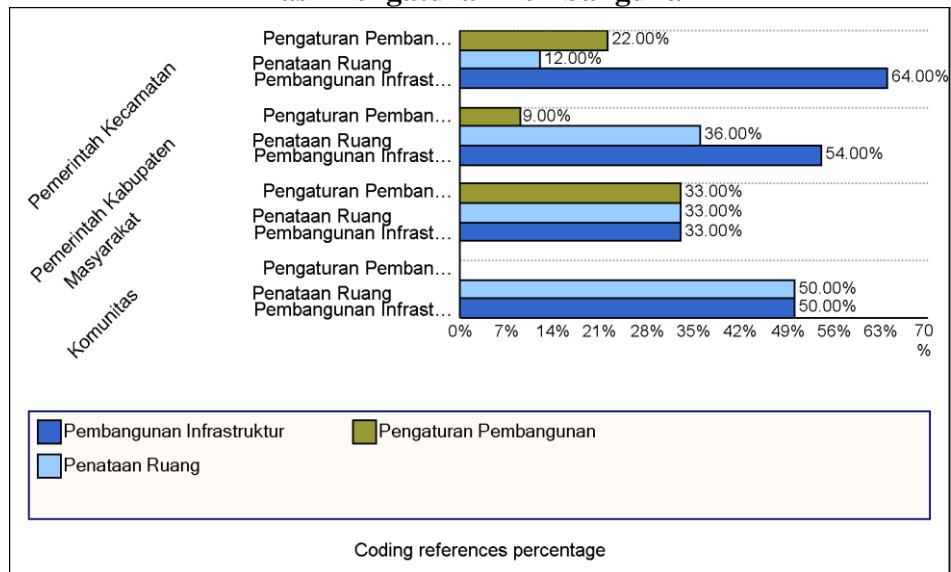
### **3.1.4 Penataan Ruang dari Prespektif Komunitas**

Pelaksanaan penataan ruang di Kecamatan Cangkringan dalam upaya pengurangan resiko bencana, Komunitas ikut dalam kampanye penanaman pohon, pengawasan penataan ruang, dan membantu pemasangan jaur evakuasi.

## **3.2 Pengaturan Pembangunan**

Pengurangan resiko bencana dapat dilakukan dengan mitigasi struktural melalui pembangunan sarana fisik, upaya mitigasi struktural yaitu merencanakan tempat untuk kepentingan bersama dan jauh dari kawasan rawan bencana gunung api (Ferusnanda dkk., 2018). Kebijakan pemerintah dalam menetapkan aturan pengaturan pembangunan atau larangan pembangunan liar adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam memberikanx perlindungan kepada warga sekitar. Kebijakan yang dibuat memberikan tujuan untuk masa yang akan datang yang lebih teratur. Untuk melihat pengaturan pembangunan di Kecamatan Cangkringan dapat dilihat pada gambar 3. 2 di bawah ini.

**Gambar 3.2**  
**Hasil Pengaturan Pembangunan**



Sumber: (Data diolah dengan Nvivo 12 Plus, 2019).

### 3.2.1 Pengaturan Pembangunan dari Prespektif Kecamatan

Pelaksanaan penataan ruang menjadi harapan meminimalkan kerusakan. Setelah letusan tahun 2010 pemerintah memberikan hunian tetap sebagai solusi dalam melanjutkan kelangsungan bagi warga cangkringan. Hunian dengan ukuran 6 x 6 saat ini tidak dapat menampung keluarga yang anaknya sudah berkeluarga sehingga salah satu dari keluarga tersebut kembali ke tempat asal.

### 3.2.2 Pengaturan Pembangunan dari Prespektif Kabupaten

Bangunan yang melanggar aturan akan dilakukan pembongkaran atas izin dari bupati sleman dengan kerja sama dengan Satuan polisi Pamong praja. Bangunan rumah masih dimaklumi karena jika hanya membuat peraturan tanpa solusi tidak akan berhasil. Tindakan yang terus dilakukan adalah melakukan pemantauan terhadap aktivitas gunung merapi untuk menjaga keselamatan warga.

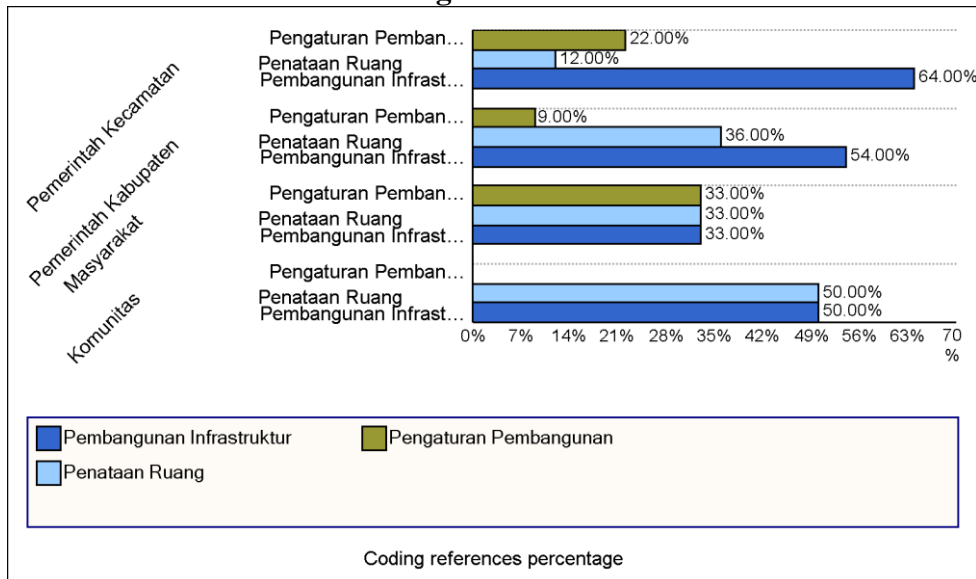
### 3.2.3 Pengaturan Pembangunan dari Prespektif Masyarakat

Warga sangat paham dengan adanya aturan pembangunan, sehingga warga memiliki keraguan untuk mengelola tanah mereka dan warga pun terpaksa melakukan larangan tersebut untuk keberlangsungan hidup dan mata pencarian.

### 3.3 Pembangunan Insfrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan fisik atau pembangunan yang terlihat secara langsung yang digunakan untuk memperkuat pertahanan maupun mendukung proses evakuasi. Pembangunan daerah rawan bencana gunung merapi adalah kegiatan pembangunan fisik dalam perbaikan fasilitas umum, fasilitas hunian, penyediaan sarana prasarana, dan mendukung kelancaran dalam evakuasi seperti pembuatan rambu evakuasi, pemberian alat penerangan, alat komunikasi, dan menyediakan ruang terbuka (Maulana. 2018). Infrastruktur adalah sarana utama dalam kelangsungan hidup, dengan tersedianya infrastruktur yang memadai semua aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Fasilitas hunian dan fasilitas umum adalah sarana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan mempermudah dalam berbagai aktivitas. Pembangunan infrastruktur dalam mengurangi resiko bencana erupsi gunung merapi di Kecamatan Cangkringan setelah diolah dengan teknik *Nvivo* menggunakan *fitur Crosstab Query* dapat dilihat pada gambar 3.3 di bawah ini:

**Gambar 3.3**  
**Hasil Pembangunan Infrastruktur.**



Sumber: (Data diolah dengan Nvivo 12 Plus, 2019).



### **3.3.1 Pembangunan infrastruktur dari Prespektif Kecamatan**

Di Kecamatan Cangkringan dibebaskan pembangunan selama pembangunan tidak merusak dan tidak melanggar peraturan. Kepala Desa meminta untuk dibuatkan jalan di KRB III dengan harapan memperlancar segala aktivitas. Namun hingga kini permintaan Kepala Desa dalam pembangunan jalan di KRB III tidak ditepati karena hal tersebut melanggar aturan dan pembuatan jalan di KRB III menggunakan dana desa dan kegiatan mandiri antar warga.

### **3.3.2 Pembangunan infrastruktur dari Prespektif Kabupaten**

Jalan sudah bagus terkecuali di KRB III yang bukan merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten (Dinas Pu RPJMD 2016-2021). Tersedia 15 Sebaran huntap (1.824 KK) 16 barak lebih menampung 300 orang, Jalur evakuasi yang tersebar telah merrata. Tanda peringatan dini 30 EWS terpasang di Kecamatan Cangkringan.

### **3.3.3 Pembangunan infrastruktur dari Prespektif Masyarakat**

Warga sangat terbantu dengan segala fasilitas yang tersedia namun kekekurangan yang dihadapi warga yaitu jalan di KRB. Dan hunian tetap yang tidak dapat menampung anggota keluarga sehingga terpaksa kembali ke KRB III. Jalur evakuasi dan petunjuk evakuasi sangat diperlukan untuk saat darurat yang sangat penting bagi pengunjung maupun warga sekitar.

### **3.3.4 Pembangunan infrastruktur dari Prespektif Komunitas**

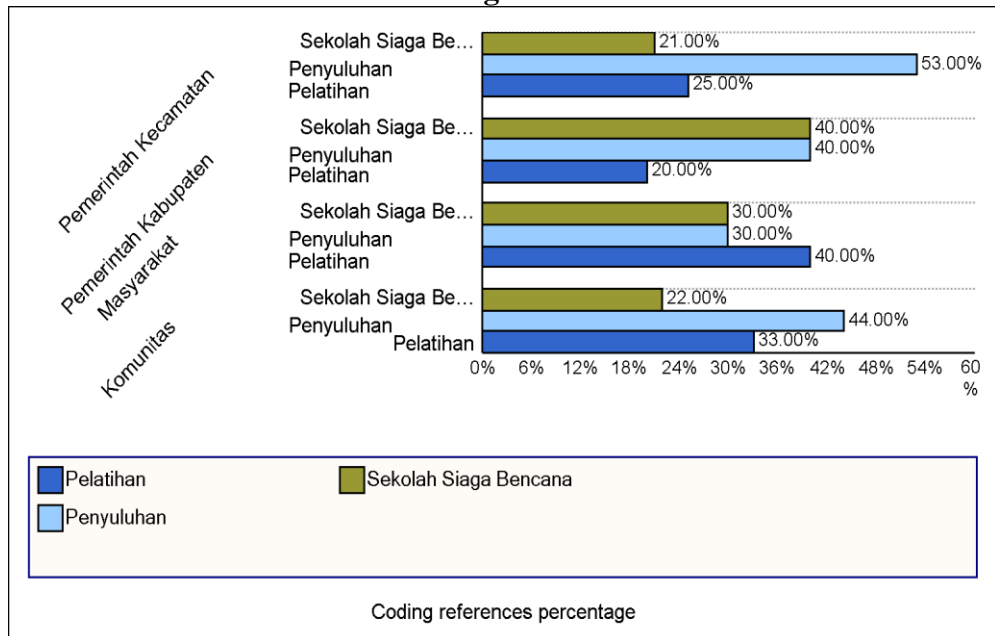
Proses pembangunan infrastruktur di Kecamatan Cangkringan, Komunitas membantu segala proses pemasangan palang tanda jalur evakuasi, dan membantu pelaporan dan perbaikan infrastruktur yang rusak (EWS).

## **3.4 Pelaksanaan Sekolah Siaga Bencana**

Sekolah Siaga Bencana adalah wadah pertama dalam memperoleh ilmu pengetahuan terutama bagi anak-anak Sekolah Dasar. Sekolah Siaga Bencana adalah Sekolah yang siap dan memahami langkah-langkah dalam pengurangan resiko bencana serta memberikan pendidikan secara langsung kepada siswa. Pemerintah memberikan sosialisasi kepada anak-anak adalah bentuk pembangunan non struktural dalam mengurangi resiko bencana (Ferusnanda dkk., 2018). Sekolah Siaga Bencana adalah wadah untuk memperoleh pendidikan dini bagi anak-anak karena dapat memberikan sosialisasi secara langsung. Pelaksanaan Sekolah Siaga Bencana dapat membentuk karakter anak dan membangun generasi yang

aman dari ancaman. Untuk melihat pencapaian dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana dapat dilihat pada gambar 3.4 di bawah ini:

**Gambar 3.4**  
**Hasil Sekolah Siaga Bencana**



Sumber: (Data Diolah Nvivo 12 Plus, 2019).

### 3.4.1 Sekolah Siaga Bencana dari Prespektif Kecamatan

Peran pihak Kecamatan Cangkringan terhadap pelaksanaan Sekolah Siaga Bwncana yakni pihak Kecamatan Cangkringan diundang dalam peresmian SSB sehingga mengetahui dan mendukung pelaksanaan Sekolah Siaga Bencana di Kecamatan Cangkringan.

### 3.4.2 Sekolah Siaga Bencana dari Prespektif Kabupaten

Sekolah siaga bencana adalah wadah pertama terutama bagi anak-anak dalam mendapatkan pengetahuan tentang kebencanaan. Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada guru hingga meresmikan SSB Terdapat 18 SSB (SD, SMP, SMA) Kegiatan: Simulasi bencana, ilmu pengetahuan PRB, Membangun karakter anak, dan peduli alam.dan terjadinya Kerja sama dengan Sekolah yang tidak berdampak.

### **3.4.3 Sekolah Siaga Bencana dari Prespektif Masyarakat**

Orang tua siswa sangat setuju dengan peresmian SSB karena membuat tenang menitipkan anak mereka. Serta SSB dijadikan titik kumpul menuju tempat evakuasi.

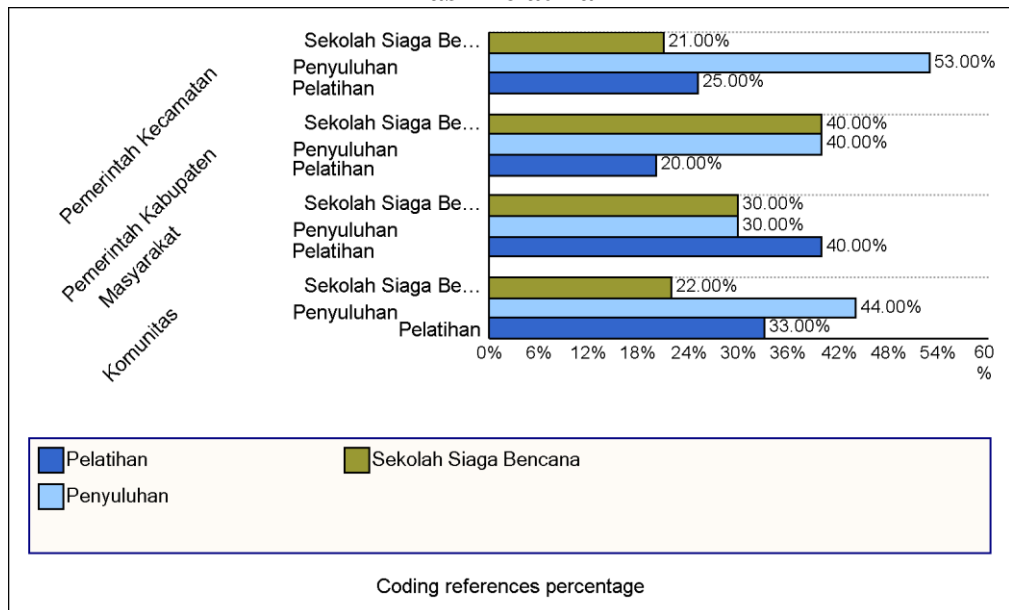
### **3.4.4 Sekolah Siaga Bencana dari Prespektif Komunitas**

Komunitas bencana mendukung penuh kegiatan SSB, Komunitas mengisi kegiatan di SSB jika diperlukan anak SSB dan SSB telah dipersiapkan agar tidak terkejut dan trauma dalam menghadapi ancaman bencana.

## **3.5 Pelatihan**

Mengurangi resiko bencana gunung api dengan meningkatkan kemampuan sensor pengamatan gunung api, meningkatkan penguasaan metode dan interpretasi data pengamatan gunung api, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya gunung api, kesadaran memelihara alam tidak merusak, mengambil atau memindahkan sensor-sensor di sekitar gunung api (Dewasari, 2015). Meningkatkan kemampuan dalam memantau kondisi gunung merapi adalah sebuah keharusan dalam meningkatkan perlindungan masyarakat serta pemberian edukasi sangat diperlukan untuk mengevaluasi hal yang seharusnya dilakukan dan dapat mengurangi tekanan hebat setelah melalui simulasi bencana. Hasil pelaksanaan pelatihan yang diberikan dapat dilihat pada gambar 3.5 di bawah ini.

**Gambar 3.5**  
**Hasil Pelatihan**



Sumber: (Data diolah dengan Nvivo 12 Plus, 2019).

### 3.5.1 Pelatihan dari Prespektif Kecamatan

Gladi lapangan/sejenis simulasi bencana yang diberikan oleh pihak Kecamatan Cangkringan fokus pada kelompok rentan yaitu: Ibu hamil, anak-anak, lansia, dan kelompok disabilitas. Desa Umbulharjo melaksanakan kegiatan kontejensi 2 tahun sekali untuk mereview data sebagai penentu tindakan bantuan agar sinkron. Pelaksanaan di Desa Kepuharjo yaitu pelatihan berkaitan dengan usaha rumah tangga, jamu, jahe, dan sofenir terdaftar PIRT. Desa Glagaharjo melaksanakan pelatihan terkadang terhalang pekerjaan warga sebagai penambang pasir, warga ada yang tidak mengikuti sampai selesai.

### 3.5.2 Pelatihan dari Prespektif Kabupaten

Bentuk pelatihan yang diberikan oleh pihak Kabupaten Sleman yaitu adanya pelatihan hingga terbentuknya Destana oleh BPBD selama 10 hari dan kegiatan simulasi bencana.

### 3.5.3 Pelatihan dari Prespektif Masyarakat

Pelatihan yang diterima oleh masyarakat Cangkringan dapat diterima dan dipahami oleh warga Cangkringan sehingga resiko yang ditimbulkan dari bencana dapat berkurang.

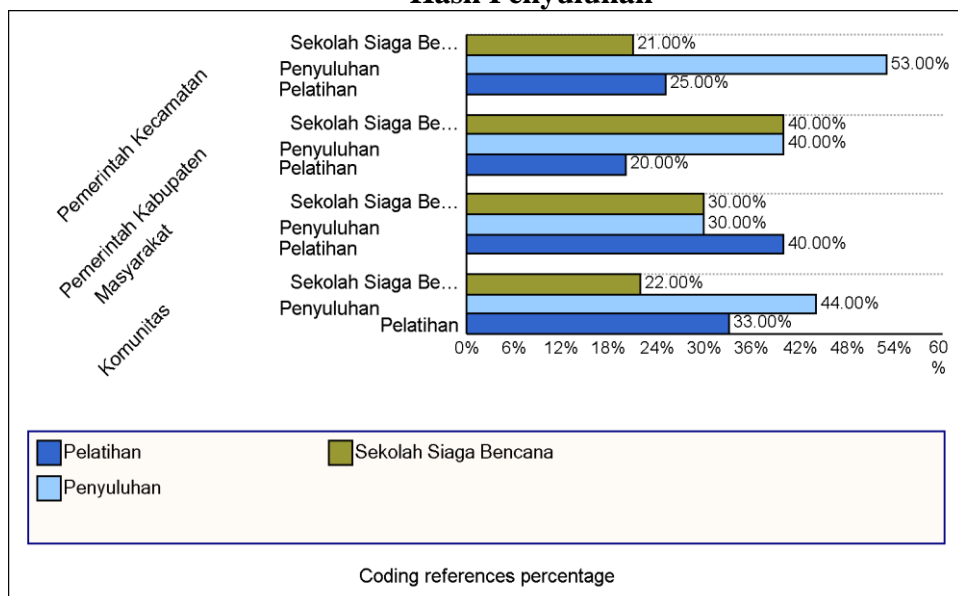
### 3.5.4 Pelatihan dari Prespektif Komunitas

Pelatihan yang diberikan berupa dapur umum bagi petugas pelatihan pertolongan pertama dan proses evakuasi bagi warga Cangkringan sehingga dapat mengurangi resiko bencana.

### 3.6 Penyuluhan

Pengurangan resiko bencana melalui pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan masyarakat tangguh bencana yaitu masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalkan kekuatan yang merusak, mengelola, dan melakukan sosialisasi karena banyak masyarakat yang tinggal di peta rawa bencana (Amni, 2017). Penyuluhan adalah kegiatan dalam memberikan informasi tentang pengurangan resiko bencana yang merupakan pembangunan non struktural berbagai penyuluhan yang diberikan akan memberikan pengetahuan tentang kawasan tempat tinggal dan meminimalkan kerusakan yang akan muncul. Dalam pelaksanaan penyuluhan dapat dilihat pada gambar 3.6 di bawah ini:

**Gambar 3.6**  
**Hasil Penyuluhan**



Sumber: (Data diolah dengan Nvivo 12 Plus, 2019).

#### 3.6.1 Penyuluhan dari Prespektif Kecamatan

Penyuluhan yang diberikan oleh pihak Kecamatan yaitu tentang pentingnya penyelamatan barang berharga penyuluhan

dilakukan setahun sekali. Kesadaran masyarakat sangat tinggi, dilihat pada tahun 2018 Pemerintah belum memberikan informasi untuk mengungsi tapi warga sudah mengungsi. Dan media komunikasi Whatshapp yang terhubung dengan BPPTKG (Badan Penyelidikan dan Pengembangan Kebencanaan Geologi) (Kepala Desa, Komunitas, BPBD, BPPTKG). dan Penyampaian melalui radio HT tanpa gangguan saat kondisi darurat.

### **3.6.2 Penyuluhan dari Prespektif Kabupaten**

Penyuluhan melalui spanduk, radio, dan papan informasi penyampaian kondisi gunung merapi. Penyampaian informasi dapat dipahami oleh warga setempat.

### **3.6.3 Penyuluhan dari Prespektif Masyarakat**

Sebagai penerima kegiatan penyuluhan dapat dipahami oleh warga dan sangat bermanfaat dalam memperoleh informasi yang valid.

### **3.6.4 Penyuluhan dari Prespektif Komunitas**

Pemberian informasi disampaikan melalui radio HT dengan Kondisi darurat masih bisa melaksanakan koordinasi dengan tim Sar. Pelaksanaan penyuluhan cara memasang masker yang benar untuk melindungi kesehatan kegiatan penyuluhan yang diberikan terkesan sama namun harus selalu dilaksanakan.

## **4 Kesimpulan Dan Saran**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengarusutamaan pengurangan resiko bencana (PRB) di daerah rawan bencana Kabupaten Sleman dengan fokus penelitian pada bencana gunung merapi di Kecamatan Cangkringan sudah terlaksana dengan cukup baik. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Penataan ruang di Kecamatan Cangkringan secara keseluruhan pihak-pihak telah berkontribusi. Pembangunan huntap dan barak sesuai dengan lokasi yang aman yang terletak di luar kawasan rawan bencana III

dan tertata dengan baik. Jalan yang mempermudah proses evakuasi dan EWS yang terpasang yang menjangkau di Kecamatan Cangkringan.

Pengaturan pembangunan yang ada di Kecamatan Cangkringan dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat Cangkringan memberikan dampak kehati-hatian dalam membangun karena kebijakan yang melarang pembangunan di kawasan rawan bencana III yaitu Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. Faktor ekonomi adalah alasan masih melanggar aturan dan pemerintah kurang memberikan ketegasan tetapi berupaya meningkatkan informasi terhadap status gunung dan menghimbau untuk waspada.

Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Cangkringan sudah terlaksana yang dapat dilihat dari ketersediaan barak pengungsian ditambah lokasi titik kumpul di tiap Desa, jumlah barak di Kecamatan Cangkringan yaitu ada 16 Barak Pengungsian. Hunian tetap sebanyak 15 sebaran di Kecamatan Cangkringan, 30 EWS, pembangunan jalan yang sudah bagus terkecuali di kawasan rawan bencana III yang tidak dibangun Pemerintah, meresmikan Desa Tangguh Bencana di seluruh Desa di Cangkringan, dan terpasangnya palang petunjuk evakuasi yang tersebar di Kecamatan Cangkringan.

Pelaksanaan Sekolah Siaga Bencana mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan karena memberikan dampak positif dalam pengembangan pengetahuan siswa dan dapat mengurangi resiko bencana dikarenakan adanya pengetahuan atau langkah-langkah dalam bertindak menyelamatkan diri. Sekolah Siaga Bencana sudah merata di Kecamatan Cangkringan dan menjadi prioritas utama.

Pelatihan setahun sekali yang diberikan dari BPBD, Komunitas Bencana, maupun dari pihak Kecamatan. Pelatihan yang diberikan dapat dipahami dengan baik oleh warga masyarakat di Cangkringan dalam bentuk simulasi bencana.

Pelaksanaan penyuluhan di Kecamatan Cangkringan dilaksanakan setahun sekali yang didapatkan oleh berbagai narasumber. Materi

penyuluhan yang diberikan terkesan sama dari tahun ke tahun dan semua kalangan secara keseluruhan telah memahami.

#### **4.1 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Sleman terkait pelaksanaan pengarusutaman pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana Kabupaten Sleman yaitu:

1. Pemerintah kabupaten Sleman dalam pelaksanaan penataan ruang harus meningkatkan pengawasan dan bertindak lebih tegas terhadap penataan ruang di Kecamatan Cangkringan agar pelaksanaan penataan ruang dapat terlaksana dengan baik.
2. Pengaturan pembangunan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi yang menegaskan tidak dilakukan pembangunan liar di kawasan rawan bencana III terutama bangunan permanen untuk tempat tinggal maka harus ditegaskan dan diberi solusi yang tepat seperti adanya pemberian hunian tetap bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana III tersebut.
3. Pemerintah Kabupaten Sleman harus melakukan penambahan hunian tetap bagi warga Cangkringan yang tinggal di kawasan rawan bencana III bagi warga yang memiliki perekonomian yang rendah, sehingga tidak menepati tempat di kawasan rawan bencana III tersebut sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.
4. Sekolah siaga bencana harus terus ditingkatkan agar informasi dapat diperoleh lebih luas, pelatihan dan penyuluhan harus selalu diadakan dengan harapan ilmu dan keterampilan yang didapatkan dalam hal pengurangan resiko bencana dan dipahami lebih luas untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan.



## Daftar Pustaka

- Akhmad Ervin Febriyan. 2017. "Pelaksanaan Program Sekolah Siaga Bencana Di SMP N 2 Cangkringan Kabupaten Sleman."
- Amni Zarkasyi Rahman. 2017. "Kapasitas Daerah Banjarnegara Dalam Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor." *Jurnal Ilmu Sosial* 14(2): 24–41.
- Creswell, John W. 2018. "Research Design: Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method."
- Dewasasri M Wardani. 2015. "Teknologi Untuk Mengurangi Risiko Bencana Letusan Gunung Api." <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/teknologi-untuk-mengurangi-risiko-bencana-letusan-gunung-api>.
- Fatmawati, Bernadeta Evi, and Sugi Rahayu. 2016. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Mitigasi Bencana Kasawan Rawan Bencana III Pasca Erypsi Gunung Merapi Desa Glagharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman." (3): 351–63.
- Lyana Ferusnanda Putri. 2018. "Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Api." [https://www.academia.edu/37959937/MITIGASI\\_BENCANA\\_ERUPSI\\_GUNUNG\\_API.docx](https://www.academia.edu/37959937/MITIGASI_BENCANA_ERUPSI_GUNUNG_API.docx).
- Maulana Istu Pradika. 2018. "Peran Pemuda Dalam Pengurangan Risiko Bencana Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Desa Kepuharjo , Kecamatan Cangkringan , Kabupaten Sleman , Daerah Istimewa Yogyakarta." 24(2).
- Rini Isdarwati. 2019. "Memahami Pentingnya Mitigasi Bencana Gunung Merapi." :Universitas Islam Indonesia. <https://www.uii.ac.id/memahami-pentingnya-mitigasi-bencana-gunung-merapi/>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana." 2007. 67(6): 14–21.